

Polisi: Masih Banyak yang Melanggar Ganjil Genap

JAKARTA (IM) - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menerangkan pihaknya mendapati banyak warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas ganjil genap di tiga ruas jalan pada Kamis (26/8). Hari ini merupakan hari perdana kebijakan ganjil-genap di tiga ruas jalan saat PPKM Level 3.

"Masih banyak kendaraan berpelt ganjil yang mencoba melintas, padahal hari ini kan tanggal 26 adalah ganjil," ujar Sambodo di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/8).

Walaupun melanggar peraturan, Sambodo mengatakan pihaknya belum menerapkan tilang. Sebagai gantinya, kendaraan tersebut diminta memutar balik karena melanggar ketentuan ganjil genap.

Dalam pengawasan ganjil-genap pagi ini, Sambodo mengatakan pihaknya dibantu aparat gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP DKI Jakarta.

"Kalau untuk pengawasan gage itu kurang lebih ada 300 personel gabungan," kata Sambodo.

Sebelumnya Dinas Perhubungan DKI mengurangi jumlah ruas jalan yang ditetapkan ganjil genap di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo mengatakan kini ruas jalan yang diterapkan ganjil-genap adalah, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, serta Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan ganjil-genap itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 345 Tahun 2021 yang ia terbitkan. Menurut Syafrin, penerapan ganjil-genap di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 adalah untuk mengurangi mobilitas, bukan agar warga beralih ke angkutan umum.

Polisi juga telah memasang rambu ganjil-genap di tiga ruas jalan tersebut. Polisi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah melakukan sosialisasi ihwal penerapan aturan itu. Dengan adanya rambu dan sosialisasi, Sambodo mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan memberlakukan sanksi tilang ke para pelanggar aturan ganjil genap. Mereka yang melanggar bakal disanksi tilang sesuai aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). ● yan

4 | Metropolis

PEKAN DEPAN DIBUKA BERTAHAP

Wagub: PTM Semua Sekolah di Jakarta Mulai Januari 2022

Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan panduan-panduan dan ketentuan teknis terhadap aktivitas sekolah khususnya protokol kesehatan agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya menargetkan pembukaan atau pembelajaran tatap muka (PTM) semua sekolah di Jakarta dilakukan pada Januari 2022. Mulai pekan depan, kata Riza, sekolah-sekolah di Jakarta akan dibuka secara bertahap.

"Nanti secara bertahap dibuka, insyallah di bulan Januari 2022 bisa semua (sekolah dibuka)," ujar Riza di Jakarta, Kamis (26/8).

Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan panduan-

panduan dan ketentuan teknis terhadap aktivitas sekolah khususnya protokol kesehatan agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Pasalnya, jaminan keselamatan aktivitas belajar mengajar di

sekolah adalah vaksinasi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

"Protokol kesehatan sesuai ketentuan aturan yang ada, jadi harus ada pembahasan protokol kesehatan dan sebagainya," tandas Riza.

Lebih lanjut, Riza mengatakan mulai pekan depan, Senin (30/8) mendatang, sebanyak 610 sekolah dari tingkat SD hingga SMK akan menggelar PTM terbatas. Sekolah-sekolah ini telah dilakukan uji coba PTM sebelumnya, yakni 85 sekolah uji coba (PTM) pada April 2021, 138 sekolah

uji coba pada Juni 2021 dan 372 sekolah uji coba pada Agustus dan 15 sekolah madrasah yang sudah dinyatakan lulus pelatihan dan penilaian.

"Dimulai dari 610 sekolah yang sebelumnya sudah melakukan uji coba. Jadi, kita teruskan uji coba seperti sebelumnya," pungkas Riza.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mengesakan kembali protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sekolah tatap muka. Pemprov DKI sendiri sudah pernah melakukan uji coba sekolah tatap muka hingga dua kali.

Tidak hanya orangtua dan murid yang diedukasi mengenai protokol kesehatan serta metode belajar, para guru dan kepala sekolah pun diberikan kompetensi baru mengenai 'blended learning' yakni kombinasi antara sekolah jarak jauh dan sekolah tatap muka. Sebab, saat uji coba, murid yang boleh datang ke sekolah dibatasi hanya 50% per rombongan kelas sehingga sisanya 50% tetap dengan metode jarak jauh. Seluruh sekolah yang mengikuti uji coba itupun dinilai sudah siap untuk menggelar sekolah tatap muka permanen. ● yan

IDN/ANTARA



PERMASALAHAN TATA KOTA DI JAKARTA

Warga beraktivitas di dekat rumahnya yang berdiri di bantaran kali di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis (26/8). Salah satu situs arsitek global Rethinking The Future (RTF) dalam artikelnya menyebutkan Jakarta sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Selain Jakarta terdapat juga Dubai di Emirat Arab, Kota Brasilia di Brasil, dan Atlanta di Georgia Amerika Serikat.

Anies Tunjuk Wali Kota Jakbar Merangkap Plt Asisten Kesra DKI

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunjuk Uus Kuswanto menjadi Pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Dewan DKI.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD DKI Jakarta, Maria Qibtya membenarkan soal surat perintah tugas penunjukan Uus yang diteken Anies pada 25 Agustus 2021.

"Betul beliau Plt di Askesra," kata dia saat dihubungi, Kamis (26/8).

Uus Kuswanto adalah Wali Kota Jakarta Barat. Anies memerintahkan Uus untuk menjabat Plt Askesra DKI sekaligus mengemban tanggung jawabnya sebagai wali kota.

Dalam surat Anies, Uus efektif menjadi Plt Askesra mulai 24 Agustus hingga 24

November 2021.

"Diberikan tugas melampirkan seluruh hasil kegiatan tugas selaku Plt Askesra kepada gubernur dan wakil gubernur DKI serta sekretaris daerah DKI," tulis Anies.

Uus menggantikan posisi Plt Askesra sebelumnya, Suharti. Sebab, Suharti pindah tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Ke-

budayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Menteri Kemendikbudristek, Nadiem Makarim melantik Suharti pada 24 Agustus 2021. Selain Plt Askesra, Suharti dulu juga membantu Anies Baswedan sebagai Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Pemprov DKI Jakarta pada 2019-2021. ● yan

Pj. Bupati Ajak Anak Usia 12 Tahun ke Atas Untuk Berani Vaksin

CIKARANG SELATAN (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, berpesan kepada anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas di wilayahnya agar berani divaksin.

Hal tersebut disampaikan saat meninjau kegiatan vaksin anak serta peluncuran Buku Forcisel Sang Pelopor Sang Pelapor, bertempat di District 1 Meikarta, Cikarang Selatan, Rabu (25/8).

"Pesannya kepada anak-anak, sebagaimana motto Kabupaten Bekasi 'BERANI', kita juga harus berani. Anak-anak mohon bisa tetap kuat dan ceria, karena kalian hebat. Meskipun kondisi sedang sulit, bahkan orang tua juga mengalami kesulitan, tapi anak-anak

harus tetap kuat," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya berpesan kepada orang tua untuk dapat memberikan kenyamanan kepada anak agar tetap merasakan kehidupan secara normal, meskipun hanya beraktivitas di dalam rumah. "Sebagai manusia, kebutuhan untuk berinteraksi secara langsung tetap ada. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan kenyamanan kepada anak walaupun tetap di rumah, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan secara normal," pungkasnya.

Selain itu, dirinya mengapresiasi pihak swasta yang telah membantu dalam kelancaran program vaksinasi anak di Kabupaten Bekasi. Ia pun

meminta kepada pihak swasta, selain melakukan pembangunan kawasan industri dan permukiman, agar tetap menyediakan lahan untuk anak-anak beraktivitas.

"Kabupaten Bekasi beruntung karena peran pihak swasta sangat besar. Namun, kami mohon di tengah pembangunan industri dan permukiman, lahan-lahan bermain anak harus tetap disiapkan. Karena anak-anak adalah tanggung jawab kita semua," terangnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (25/8) sore.

Kegiatan vaksinasi anak serta peluncuran buku Forcisel Sang Pelopor Sang Pelapor merupakan awal dimulainya kampanye untuk mendukung

vaksin anak di Kabupaten Bekasi.

Pada vaksinasi tersebut, Pemkab Bekasi telah menyediakan 200 dosis vaksin yang digunakan untuk 50 anak berkebutuhan khusus, serta 150 anak yang berasal dari Kecamatan Cikarang Selatan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ibu Ria Dani Ramdan selaku Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ani Gustini, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Enny Mainarti, Presiden Direktur Meikarta Reza Chatab, Head of PR Lippo Cikarang Jeffrey Rawis, serta unsur TNI dan Polri. ● mdl

Pj. Bupati Bekasi Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kanan) bersama jajaran terkait saat mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 secara virtual di Command Center, Gedung Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Rabu (25/8).

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual di Command Center Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Rabu (25/8). Menghadiri rapat tersebut, Pj. Bupati Bekasi didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi, dan Kepala Dinas Perdagangan, Muchlis.

Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firmansyah, serta para kepala daerah

dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Indonesia.

Pj. Bupati Bekasi mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 Kabupaten Bekasi mengalami deflasi. Untuk itu, dirinya akan mendorong dan membangkitkan kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Dirinya menambahkan, secara garis besar di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 3 sektor yang paling utama, yakni industri besar, industri kecil UMK, serta pertanian. Untuk itu, dirinya akan mendorong peningkatan pada sektor-sektor

tersebut.

"Untuk industri besar berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah seperti relaksasi, intensif, infrastruktur akan kita kawal supaya bisa berjalan," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (25/8) sore.

Kemudian, untuk sektor industri kecil dan menengah atau UMK, akan diberikan bantuan modal serta fasilitas pemasaran. Sedangkan, pada sektor pertanian akan diberikan bantuan benih, pupuk, dan subsidi agar inflasi bisa terkendali dengan baik.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, rasa syukur karena di tengah ketidakpastian saat ini perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi terkendali.

Ia mengatakan, pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07% (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52% (YoY), angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar 3%.

"Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah bukan berarti hal yang mengembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas," ujarnya.

Dirinya juga menekankan kepada jajaran pemerintahan untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kuartal III-2021 ini. "Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran Covid-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi," tegasnya. ● mdl



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, bertempat di Wisma Intra Asia, Ground Floor, Jl. Prof. DR. Soepomo SH No. 58, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 14.19 WIB dan ditutup pada pukul 15.14 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik beserta persyaratan penunjukkan lainnya;
3. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Bapak Achmad Sutjipto | Komisaris Utama Independen |
| 2. Bapak Andy Raharja | Komisaris |
| 3. Bapak Arifin Seman | Direktur Utama |
| 4. Bapak Marius Obbert Mulia | Direktur |
| 5. Bapak Ari Widiatmoko | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 371.477.600 saham yang merupakan 88,103% dari 421.640.000 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat dengan suara bulat, memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan sebagai auditor independen dengan opini "Wajar Tanpa Modifikasi";
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat dengan suara bulat, memutuskan :

1. Penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Kantor Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang persetujuan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
 - b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
 - c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat dengan suara bulat, memutuskan :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat dengan suara bulat, memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri :
 - Bapak Pamira Winea dari jabatannya selaku Komisaris Independen; dan
 - Ibu Chen Yuanyuan dari jabatannya selaku Komisaris;
 disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri :
 - Bapak Hari Setianto; dan
 - Ibu Ji Ruliantan,
 masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris Independen Bapak Achmad Sutjipto

- Komisaris Bapak Andy Raharja

DIREKSI

- Presiden Direktur Bapak Arifin Seman

- Direktur Bapak Marius Obbert Mulia

- Direktur Bapak Ari Widiatmoko

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat dengan suara bulat, memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan setinggi-tingginya atas Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa baktinya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Agustus 2021
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk
Direksi Perseroan